

ARTIKEL OPINI HUKUM – JDIH

ISU HAM DAN KEKERASAN DALAM PENEGRAKAN HUKUM DI INDONESIA: REFLEKSI DAN ARAH PERBAIKAN 2025

Penulis: *Jhon S.E. Panggabean*

Institusi: *Hukumonline*

Tahun: 2025

ABSTRAK

Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam praktik penegakan hukum masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Tahun 2025 dipandang sebagai momentum strategis untuk memperbaiki citra dan kualitas penegakan hukum, seiring meningkatnya sorotan publik terhadap kasus kekerasan oleh aparat. Artikel ini mengkaji hubungan antara penegakan hukum dan HAM, serta mengidentifikasi tantangan yang memicu terjadinya kekerasan dalam proses hukum. Rekomendasi perbaikan mencakup penguatan akuntabilitas aparat, transparansi, digitalisasi mekanisme penegakan hukum, serta reformasi pendidikan HAM. Upaya ini menjadi urgensi agar penegakan hukum tidak hanya menjaga ketertiban umum, namun sekaligus menjamin perlindungan martabat dan hak dasar setiap warga negara.

Kata kunci: Penegakan hukum, HAM, kekerasan aparat, reformasi 2025, akuntabilitas.

Pendahuluan

Tahun 2025 menjadi momentum evaluasi terhadap kualitas penegakan hukum nasional, terutama dalam konteks perlindungan HAM. Berbagai kasus kekerasan yang melibatkan aparat penegak hukum terus terjadi sehingga menimbulkan persepsi publik bahwa sistem hukum belum sepenuhnya berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. Perbaikan sistemik diperlukan agar penegakan hukum tidak hanya mengikuti prosedur formal, tetapi juga menjunjung tinggi martabat manusia.

Hubungan Penegakan Hukum dan HAM

Penegakan hukum idealnya menjadi sarana perlindungan HAM. Namun praktik lapangan menunjukkan masih adanya:

- kriminalisasi berlebihan terhadap masyarakat sipil,
- penggunaan kekerasan saat penangkapan dan interogasi,
- penembakan tanpa prosedur,
- minimnya akuntabilitas pelanggaran oleh aparat.

Fenomena ini memperkuat budaya impunitas dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum.

Tantangan Utama dalam Perlindungan HAM

Beberapa faktor yang memperburuk situasi HAM dalam penegakan hukum antara lain:

1. Lemahnya pengawasan internal dan independen terhadap aparat.
2. Kurangnya transparansi proses penindakan pelanggaran oleh aparat.
3. Minimnya penggunaan teknologi untuk dokumentasi proses penegakan hukum.
4. Pendidikan HAM yang belum menjadi prioritas struktural.
5. Kelemahan regulasi dalam mengatur pertanggungjawaban pejabat penegak hukum.

Tantangan tersebut memperkuat pola kekerasan yang berulang dalam praktik.

Arah Perbaikan ke Depan

Untuk membangun penegakan hukum yang humanis dan berorientasi HAM, beberapa langkah strategis diperlukan:

- **Reformasi lembaga pengawas aparat** agar lebih independen dan tegas.
- **Kewajiban dokumentasi digital** (CCTV / body cam) dalam proses penangkapan dan interogasi.
- **Pelatihan HAM berkelanjutan** di institusi kepolisian, kejaksaan, dan pemasarakatan.
- **Partisipasi masyarakat dan media** dalam mengawasi praktik penegakan hukum.
- **Harmonisasi regulasi nasional dengan standar HAM internasional.**

Reformasi berbasis transparansi dan akuntabilitas dipercaya mampu mengubah paradigma penegakan hukum.

Penutup

Membenahi persoalan HAM dan kekerasan aparat bukan hanya tentang memperbaiki citra penegakan hukum, melainkan memastikan keberlangsungan negara hukum yang demokratis dan beradab. Jika diarahkan dengan baik, 2025 dapat menjadi tonggak pembaruan menuju penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan menghormati martabat setiap warga negara.

Sumber

- **Panggabean, Jhon S.E. (2025). “2025: Momen Memperbaiki Citra Penegakan Hukum di Indonesia.”** Hukumonline.